Jurnal Ahsana
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda di Sungai Bambu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara

Iqbal Aidar Idrus[1], Muhammad Dipo Lukito[2]
Universitas Andi Djemma[1], Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta[2]
E-mail: idrusiqbal@yahoo.com

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
22.01.2024	04.02.2024	11.02.2024	23.02.2024

Abstract: *The purpose of this article is to find out and describe the efforts of Kesbangpol North Jakarta in socializing the development of ideology and national insight as well as implementing good governance in its implementation. The research method uses socialization methods in the form of interviews and document searches. Based on the research results, it can be concluded that the development of Pancasila ideology and national insight tends to be good and Good Governance has been implemented. From the work program implemented by Kesabangpol, indicators of success for Good Governance have been implemented, namely community participation, transparency, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision. However, there are still several shortcomings in terms of transparency, namely the lack of socialization regarding activity budgets and accountability reports and due to the Covid-19 pandemic, socialization regarding the state defense program and national seminars had to be carried out online.*
***Keywords**: Effort, Good Governance, Ideology*

Abstrak: Tujuan artikel ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Kesbangpol Jakarta Utara dalam sosialisasi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan serta penerapan *good governance* dalam pelaksanaannya. Metode dalam penelitian menggunakan metode sosialisasi berupa wawancara dan penelusuran dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan cenderung baik dan sudah menerapkan *good governance*. Dari program kerja yang dilaksanakan Kesabangpol, sudah menerapkan indikator kesuksesan *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, trasnparansi, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi yang strategis. Namun masih ada beberapa kekurangan dalam hal transparansi, yakni kurangnya sosialisasi mengenai anggaran kegiatan dan laporan pertanggung jawaban dan dikarenakan adanya pandemi covid-19, sosialisasi mengenai program bela negara dan seminar kebangsaan terpaksa harus di laksanakan secara daring.
Kata Kunci: Upaya, Good Governance, ideologi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini yang di tandai dengan perkembangan teknologi menyebabkan banyak pemahaman dan pengaruh luar yang masuk dengan mudah. Hal ini tersebut menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap arah kehidupan pemuda indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Karena adanya dinamika global yang saat ini deras masuk ke Indonesisa, menyebabkan sedikit pergeseran kehidupan pemuda di Indonesia yang sedikit mengarah pada paham liberalisme. Paham liberalisme sendiri merupakan paham yang menekankan kebebasan, yang tentu saja bertolak belakang dengan nilai nilai yang terkandung dalam Ideologi Pancasila (Sudewi et al, 2023).

Selain pemudaran rasa kecintaan dan kebangsaan yang di sebabkan dari luar, keberagaman suku, ras, dan agama di Sungai Bambu juga menjadi sebuah ancaman memudarnya rasa kecintaan dan kebangsaan terhadap tanah air karena rentan terjadinya konflik antar pemuda yang di dasari rasa fanatik dengan suatu suku, ras dan agama. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila serta komitmen dari Pemerintah, Pemuda dan stakeholder terkait agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan.

Mengingat wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa memahami keberadaan identitas dan lingkungan yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari filosofi bangsa itu sesuai dengan keadaaan wilayah suatu negara dan sejarah yang di alaminya. Wawasan ini menentukan cara pandang suatu bangsa dengan memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya dalam mencapai cita citanya dan bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungan baik kedalam maupun keluar (Suhady & Sinaga,2006 dalam Khoir,2021).

Pentingnya pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi pemuda agar pemahaman tentang ideologi pancasila dan rasa cinta tanah air tidak memudar (Wahyudi et al, 2023). Upaya pemerintah kota Jakarta Utara khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengedukasi dan mengsosialisasikan pentingnya pemahaman ideologi pancasila dan wawasan

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

kebangsaan serta memfasilitasi penyelesaian konflik antar golongan.

Dari uraian diatas, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pasal 3 ayat 1 tercantum di dalamnya melakukan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan serta politik dan demokrasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah ialah "Bagaimana upaya kesbangpol dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan di Sungai Bambu?". Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang di lakukan oleh Kesbangpol Jakarta utara dalam melakukan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan berdasarkan Good Governance.

Menurut Mardiasmo dalam Merliana (2020), *Good governance* merupakan suatu pelaksanaan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sesuai dengan cita-cita demokrasi dan pasar yang efisien. Sedangkan menurut Leny Nofianti dalam Marliana (2020) berpendapat bahwa *good governance* merupakan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas yang diberikannya secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Demi mewujudkan pemerintahan yag bersih memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintahan.

United Nation dalam Pasolong (2017) menjelaskan bahwa untuk mencapai *good governance* maka perlu partisipasi masyarakat, yaitu semua masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun diwakilkan oleh Lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi dibangun berdasarkan kebebasan berpendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruksif.

1. Tegaknya supremasi hukum merupakan kerangka hukum yang adil dan diberlakukan tidak pandang bulu.
2. Transparansi merupakan arus informasi yang bebas melalui proses pemerintahan, Lembaga-lembaga yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
3. Peduli pada stakeholder merupakan seluruh proses pemerintahan yang harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
4. Berorientasi pada konsensus merupakan tata pemerintaha yang menjembatani kepentingan yang berada demi terbangunnya suatu konsensus terbaik bagi masyarakat terutama dalam kebijakan.
5. Kesetaraan merupakan kesempatan masyarakat untuk mempertahankan kesejahteraan mereka.
6. Efektifitas dan efisiensi merupakan proses pemerintahan yang membuahkan hasil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menggunkan sumber daya yang optimal.
7. Akuntabilitas merupakan pengambil keputusan di pemerintahan sector swasta dan organisasi masyarakat dan bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun Lembaga-lembaga yang berkepentingan.
8. Visi strategis merupakan para pemimpin yang memiliki perspektif yang luas dan jauh kedepan tentang kepemerintahan yang baik, pembangunan manusia, kepekaan untuk mewujudkannya dan memiliki pemahaman atas dasar bagi perspektif tersebut.

Pemuda merupakan agen perubahan yang memiliki potensi besar dalam menentukan arah dan masa depan suatu bangsa (Suradi, 2019). Namun, tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi seringkali memperhadapkan generasi muda pada arus informasi yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan (Kuswanto, 2023). Wilayah Sungai Bambu di Jakarta Utara memiliki keunikan tersendiri sebagai salah satu kawasan perkotaan yang padat penduduk, namun juga memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter generasi muda. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara mengambil langkah strategis dengan melakukan sosialisasi yang intensif terhadap pemuda di Sungai Bambu, dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen mereka terhadap ideologi Pancasila serta meningkatkan kesadaran akan wawasan kebangsaan. Sebagai bagian dari ibu kota negara, Jakarta Utara memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan identitas nasional di kalangan generasi muda, yang merupakan penerus bangsa.

Dalam konteks ini, pembahasan mengenai implementasi program sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Sungai Bambu menjadi relevan untuk dieksplorasi. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, budaya, dan politik di wilayah tersebut, serta melalui pendekatan yang tepat, dapat dirumuskan strategi efektif dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi generasi pemuda.

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sosialisasi yang berfokus pada pemahaman menyeluruh terhadap berbagai fenomena yang dialami oleh objek penelitian, seperti perilaku, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya. Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Utara. Rentang waktu penelitian mencakup tahapan dari persiapan proposal hingga penyusunan laporan akhir sesuai dengan tujuan penelitian.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan melibatkan beberapa metode, antara lain: observasi, yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung dan mendetail serta mencatat berbagai aspek yang diamati; wawancara, yang dilakukan secara langsung kepada pihak yang berkompeten dan terlibat dalam konteks penelitian, sehingga informasi yang diperoleh memiliki keabsahan dan kredibilitas yang tinggi; serta dokumentasi, yang merupakan pengumpulan data dari berbagai sumber non-visual seperti dokumen dan arsip yang relevan dengan objek penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan hasil yang berkualitas mengenai efektivitas sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap generasi pemuda di Sungai Bambu, Jakarta Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda di Sungai Bambu Jakarta Utara

Pemerintah merupakan entitas yang memiliki peran penting dalam mengelola urusan masyarakat dengan tujuan mencapai kemajuan dan keberhasilan negara secara keseluruhan (Marcelina, 2022; Martua, 2023). Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah merupakan serangkaian tindakan yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, yang direalisasikan melalui program-program kegiatan yang telah ditetapkan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga dapat berjalan dengan efektif. Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol Jakarta Utara dalam rangka membina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan antara lain:

1. Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK), yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan rasa persatuan di kalangan masyarakat.
2. Webinar Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila Dalam Rangka Membangun Karakter Anak Bangsa Yang Berjiwa Pancasila, sebagai upaya untuk mengedukasi dan membangun karakter generasi muda yang kokoh berlandaskan Pancasila.
3. Webinar Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Jakarta Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebangsaan dan menguatkan rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat Jakarta Utara.
4. Program Pemantapan Kader Bela Negara, yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai bagian dari pertahanan negara serta membentuk sikap patriotisme dan kebangsaan yang kuat.

Melalui berbagai program ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara dapat secara efektif melaksanakan tugasnya dalam membina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kesadaran dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat. Program ini diawali dengan koordinasi dengan pemerintah setempat, hingga dilaksanakannya kegiatan sosialisasi (Gambar 1).

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333



Gambar 1. Proses koordinasi dengan pemerintah setempat, serta kegiatan sosialisasi

Penerapan *Good Governance* di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara. Menurut UNDP dalam buku Larisu (2021) menyatakan bahwa *Good Governance* adalah penyelenggaraan kekuasaan negara dalam penyediaan pelayanan yang baik dimana di perlukan komitemen dan keterlibatan semua pihak baik pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan dan menjalankan proses pelayanan dengan baik. Adapun indikator *Good Governance* yang di nyatakan *United Nation* dalam Pasolong (2017) sebagai acuan penulis mencapai pelayanan Kesbangpol dengan baik, antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat
   Kesbangpol dalam melakukan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa mengupayakan agar setiap komponen warga negara sebagai indikator pembangun bangsa agar dapat tercapainya peningkatan kualitas masyarakatnya sehingga mampu menghadapi permasalahan yang di hadapi.
   Seperti apa yang disampaikan informan langsung yaitu pak Bastian Widyatama, S.IP selaku Staff Sub Kelompok Urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik dalam upaya Kesbangpol mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai program kerja. Seperti apa yang di sampaikan informan pada saat wawancara, yakni :*"Upaya kita biasanya mengsosialisasikan langsung kepada rekan rekan ormas ormas, karang taruna, PKK, dan sekolah sekolah yang memang biasa kami undang."*
   Program pembinaan wawasan kebangsaan ini merupakan suatu program bela negara yang bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program ini mengikutsertakan organinasi masyarakat antara lain karang taruna, ormas, PKK serta para pemuda. Masyarakat memiliki peran dan aksi aktif dalam tercapainya tujuan dari program bela negara dan seminar kebangsaan.
2. Transparansi Informasi
   Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya harus menerapkan prinsip transparansi dalam menyebarluaskan informasi. Tujuan dari transparansi ini yaitu agar

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

masyarakat mengetahui segala bentuk informasi seperti anggaran, kegiatan, program yang ingin dijalankan, tujuan yang ingin dicapai, dan laporan pertanggung jawaban. Tujuan ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

Informasi yang diberikan oleh Kesbangpol mengenai informasi kegiatan sudah terbilang tepat, jelas dan memadai. Tetapi ada beberapa yang kurang di sosialisasikan secara lebih dekat karena butuh kunjungan ke kantor Kesbangpol agar mengetahui lebih detail perihal anggaran kegiatan dan laporan pertanggung jawaban. Hasil dari wawancara dengan mas Dimas Probolinggo Suseno selaku karang taruna RW 06 Sungai Bambu, yakni :

"Informasi yang saya dapatkan dari pemerintah bisa dikatakan jelas dan tepat, tetapi memang jika saya ingin tahu tentang laporan pertanggung jawaban sebuah kegiatan saya harus bertanya langsung kepada pihak kesbangpol dan itu pernah disosialisasikan kepada saya saat mengikuti acara seminar kebangsaan"

Hal itu di benarkan oleh pak Bastian Widyatama, S.IP selaku staff Sub kelompok urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik. Seperti apa yang di sampaikan langsung oleh informan, yakni :*"Untuk laporan pertanggung jawaban kami tidak sebar luaskan tetapi jika ada masyarakat yg ingin mengetahui bisa langsung menanyakan kepada kami, dan untuk laporan pertanggung jawaban sudah melalui proses pemeriksaan dari inspektorat dan BPK"*

3. Efektifitas dan Efisiensi

   Efektivitas dan efisiensi dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan berjalan, dan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sehingga apabila tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program bela negara maka program itu telah mencapai tujuan. Hasil dari program kerja yang di laksanakan oleh Kesbangpol melalui program kader bela negara dan seminar seminar kebangsaan berdampak positif kepada masyarakat khususnya pemuda. seperti apa yang disampaikan dari hasil wawancara mas Dimas Probolinggo Suseno selaku anggota karang taruna RW 06, yakni :

   "Setelah saya mengikuti program bela negara dan seminar kebangsaan ini membuat saya tergerak untuk selalu melakukan kegiatan yang positif seperti membantu sesama, gotong royong, berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama dan turut serta membantu pemerintah dalam memajukan bangsa Indonesia."

   Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan organisasi, termasuk penjelasan tentang kegagalan maupun keberhasilan suatu kegiatan atau program kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, baik lembaga vertikal terkait dan masyarakat. Seperti yang di sampaikan dari hasil wawancara dengan Ibu Rahmi Meilani, S.IP selaku ketua sub kelompok urusan ketahanan, ekonomi, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan, yakni : *"Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus berusaha untuk mencapai tujuan dari program bela negara yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa patriot yang tangguh. Untuk perwujudan tindak berkelanjutan ini kami akan mengadakan seminar dan program kemah bela negara secara offline mengingat dalam 3 tahun terakhir ini kami hanya melakukan program bela negara dan seminar wawasan secara online".*

4. Visi yang Strategis

   Visi yang mudah dipahami dan diterima oleh semua pihak masyarakat akan mudah mencapai sebuah keberhasilan. Dalam program bela negara dan seminar kebangsaan badan Kesbangpol sudah menerapkan dan merencanakan sebuah program yang mudah diterima semua kalangan remaja sungai bambu dengan mengadakan kemah bela negara yang dimana kegiatan tersebut memang biasanya disukai oleh pemuda. Seperti apa yang di sampaikan Ibu Rahmi Meilani S.IP, Ketua Sub Kelompok urusan Ketahanan, Ekonomo, Seni, Budaya, Agama, kemasyarakatan, yakni : *"Bagaimana menerapkan program yg dapat di terima di kalangan remaja? Untuk saat ini, karna sebelumnya terjadi pandemi kami hanya melakukan kegiatan dengan webinar – webinar saja, maka untuk kedepan kami sudah merencanakan dengan mengadakan kemah bela negara yang dimana kegiatan tersebut memang biasanya disukai oleh pemuda dan juga biasanya materi – materi yang di sampaikan lebih dapat dipahami oleh para peserta."*

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan mengenai Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Generasi Muda di Kelurahan Sungai Bambu, dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Partisipasi Masyarakat, pihak pemerintah maupun pemuda memiliki peran dan aksi aktifnya masing – masing dalam hal bela negara dan wawasan kebangsaan. Peran dan aksi dari pihak pemerintah yaitu mengupayakan program – program terkait bela negara dan wawasan kebangsaan dan peran dari masyarakat yaitu dengan mengikuti program program yang telah di upayakan oleh pemerintah
2. Transparansi, pemerintah sudah memberikan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya secara tepat, jelas dan memadai. Hanya saja perihal anggaran atau laporan pertanggung jawaban tidak disebarkluaskan akan tetapi jika masyarakat ingin mengetahuinya maka pihak pemerintah akan memberikan informasi terkait anggaran dan perlu diketahui bahwa laporan pertanggung jawaban sudah melalui proses pemeriksaan dari inspektorat dan BPK. Hal ini yang perlu lebih disosialisasikan lebih dekat kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pemerintah dengan masyarakat.
3. Efektifitas dan Efisiensi, segmentasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Sungai Bambu adalah para remaja, anak muda, maupun yang sudah dewasa. Dampak dari kegiatan bela negara dan seminar kebangsaan ini telah menuai hasil yang baik dan positif.
4. Akuntabilitas, Program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sejauh ini berjalan dengan baik namun setelah pandemic covid 19, program belum bisa dijalankan dengan optimal. Perihalnya, program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dari saat pandemic covid 19 hingga saat ini hanya sebatas sosialisasi secara daring yang dinilai kurang efektif.
5. Visi Strategi, program bela negara dan seminar kebangsaan di Sungai Bambu badan kesatuan Bangsa dan Politik selama ini sudah melakukan upaya agar materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik hanya saja karena terjadinya pandemi pihak badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus menjalankan program ini secara daring sehingga membuat sebagian peserta yang baru mengikuti dan yang pernah mengikuti ingin kegiatan ini berlangsung secara offline kembali karena dinilai lebih mudah dipahami.

REFERENSI

Harbani Pasolong (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.

Khoir Faisal. (2021). *Upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan di kota Jambi.* Larisu, Hasyrul. (2021). *layanan dan komunikasi publik menuju Good Governance. Surayaba: CV. Global Aksara Marsudi, Al Subandi.*

Kuswanto, H., & SH, M. (2023). Identitas Nasional di Era Globalisasi.

Marcelina, S. (2022). *KEWENANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI KABUPATEN SELUMA DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA* (Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU).

Martua, J., Rahmat, R., & Marpaung, Y. P. (2023). PERANAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. *Ex-Officio Law Review*, *2*(2), 145-156.

Phílein Firstanty Praveira. (2016). *pembinaan wawasan kebangsaan oleh kantor kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik) bagi siswa sma/smk di kabupaten majalengka.13-17.*

Ristala Harky. (2019). *Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan pilpres dan wapres tahun 2019. Vol 3 No,1*

Sudewi, S., Andoyo, A., & Ipnuwati, S. *(2023). SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN. Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 13-21.*

Suradi, S. (2019). Karang taruna, agen perubahan dan pengembangan masyarakat di pandeglang. *Sosio Konsepsia*, *8*(3), 241-254.

Wahyudi, J., Wahaniputri, V. A., & Berlianza, S. (2023). Penguatan Nasionalisme Pelajar dan Mahasiswa Melalui Forum Literasi Kebangsaan. *Surya Abdimas*, *7*(2), 328-337.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Vol. 2, No. 1 - Februari 2024, Hal. 1-7
DOI: https://doi.org/10.59395/ahsana.v1i1.333

Tugas Pokok dan Fungsi. https://bakesbangpol.jakarta.go.id/v2/, diakses 07 Juni 2022, Pukul 02.00 WIB.

Wawancara, Bastian Widyatama, S.IP selaku Staff Sub Kelompok Urusan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik, pada 8 Febuari 2023.

Wawancara, Dimas Probolinggo Suseno selaku anggota karang taruna RW 06, pada 10 Febuari 2023.

Wawancara, Rahmi Meilani, S.IP selaku ketua sub kelompok urusan ketahanan, ekonomi, seni budaya, agama, dan kemasyarakatan, pada 8 Febuari 2023.